



Bupati Kustini meninjau kawasan wisata Kaliurang.

WISATA CANDI SEGERA MENYUSUL Kaliurang dan Kaliadem Dibuka Lagi

PAKEM (KR) - Bupati Sleman Kustini meresmikan operasional lokasi wisata di Kaliurang dan Kaliadem. Peresmian ditandai dengan peninjauan secara langsung di lokasi wisata yang dibuka lagi, Sabtu (23/10). Menurut Bupati, adanya perkembangan PPKM di Kabupaten Sleman yang saat ini berada di level 2, memungkinkan pembukaan kembali operasional lokasi wisata di Sleman. "Saat ini lokasi wisata di Kabupaten Sleman dibuka secara bertahap, khususnya lokasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Sleman dan menjadi sumber PAD," jelasnya. Bupati menuturkan, saat ini pembukaan dilakukan di wisata Taman Kaliurang dan Wisata Kaliadem. Kedua lokasi tersebut merupakan wisata yang dikelola oleh Pemkab Sleman. "Dengan resmi dibukanya kembali wisata tersebut, secara otomatis retribusi untuk masuk lokasi wisata kembali dijalankan," jelasnya. Selain wisata di Kaliurang, Bupati menyebut wisata candi juga akan segera beroperasi

kembali. Adapun wisata candi tersebut yaitu Candi Banyunibo, Candi Ijo dan Candi Sambisari. Sementara untuk wisata yang dikelola masyarakat, boleh kembali dibuka dengan ketentuan telah memiliki screening PeduliLindungi dan menerapkan prokes. Ketentuan pembukaan wisata tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran NOMOR : 188/05836 tentang Pembukaan Destinasi Wisata di DIY yaitu Destinasi wisata yang sudah memiliki sertifikat CHSE, QR Code PeduliLindungi dan menerapkan aplikasi Visitingjogja, diizinkan melakukan pembukaan destinasi dengan kapasitas maksimal 25%. "Sementara destinasi wisata yang belum memiliki sertifikat CHSE, dapat melakukan uji coba operasional terbatas dengan kapasitas maksimal 25% dengan menerapkan sistem reservasi dan screening kesehatan standar PeduliLindungi kepada pengelola dan wisatawan/pengunjung melalui aplikasi Visiting Jogja," pungkash Bupati. **(Has)-f**

UNTUK DOSIS PERTAMA DAN KEDUA Kalurahan Margokaton Vaksin 2.000 Warga



Warga disuntik vaksin di Kalurahan Margokaton.

SLEMAN (KR) - Kalurahan Margokaton bersama Puskesmas Seyegan dan didukung Anggota DPR RI H Sukanto melakukan vaksinasi bagi 2.000 warga baik dosis pertama dan kedua. Dengan sasaran itu, ditargetkan semua warga Margokaton sudah 100 persen mendapat vaksinasi. Pj Lurah Margokaton

Subagyo Rahayu mengatakan, sebelumnya para pamong telah melakukan penyisiran di padukuhan untuk mendata warga yang belum divaksin. Ternyata masih ada 700 orang yang belum divaksin dan 1.300 untuk dosis kedua. "Makanya hari ini, kami adakan vaksinasi dengan target 2.000 orang dengan

rincian 700 orang untuk dosis pertama dan 1.300 dosis kedua. Kalau semuanya hadir, kami pastikan warga Margokaton sudah 100 persen divaksin," ujar Subagyo didampingi Kepala Puskesmas Seyegan drg Ratih Susila, belum lama ini. Staf Ahli Anggota DPR RI H Sukanto, Subanar Surya Saputra SH menambahkan, kegiatan ini didukung oleh Anggota DPR RI H Sukanto. Dalam mempercepat vaksinasi, Sukanto telah mengalokasi ratusan miliar. "Kebetulan H Sukanto sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi IX. Pihaknya telah mengalokasikan untuk percepatan vaksinasi di DIY. Harapannya akhir tahun ini sudah 100 persen warga DIY divaksin," tambahnya. **(Sni)-f**

BUPATI MINTA MASYARAKAT TAK PERLU PANIK Uji Coba PTM, Satu Siswa Positif Covid-19

SLEMAN (KR) - Seorang siswa SMP di Pakem dinyatakan positif Covid-19 dalam tes acak sekolah yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun masyarakat tak perlu panik dan tetap men-disiplinkan protokol kesehatan.

"Sudah kita tangani dengan melibatkan dinas kesehatan, pendidikan serta pemangku setempat. Intinya orangtua dan siswa tidak perlu panik," tegas Bupati Sleman Kustini saat dikonfirmasi, Sabtu (23/10).

Menurut Bupati, sekolah yang ditemukan kasus positif tersebut sudah ditutup. Langkah penutupan diambil agar sekolah tersebut segera disterilisasi. "Saat ini (sekolah) ditutup. Selanjutnya dilakukan sterilisasi dan tracing dari kasus itu. Dan alhamdulillah, info terkini tidak ada (teman sekolah) yang positif," terangnya.

Dari hasil tracing, siswa tersebut diketahui tertular positif covid-19 dari orang tuanya saat di rumah. Untuk itu, Bupati mengingatkan pada para orangtua untuk memastikan protokol kesehatan di dalam rumah. "Percuma juga kalau di sekolah sudah prokes tapi di rumah prosesnya kendur," tandasnya.

Bupati juga memastikan PTM di sekolah lain tetap berjalan seperti biasanya. Pemkab Sleman juga akan melakukan swab sampling lanjutan untuk memastikan tidak ada penyebaran virus Covid-19. "Kita akan adakan swab sampling lagi di lima kapanewon. Kita massifkan pemantauan baik dari lapangan maupun tes swab sampling agar semua aman dan sehat," pungkashnya. **(Has)-f**

HUT, SDN Godean 1 Gali Potensi Siswa

SLEMAN (KR) - Peringatan puncak HUT ke-109 SDN Godean 1 Sidoluhur Godean berlangsung dengan sederhana. Puncak acara berlangsung di lingkungan sekolah dengan dihadiri perwakilan wali murid, peguayuban kelas, Komite Sekolah dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Kepala SDN Godean 1 Drs Rahmat Susila menjelaskan, di usia 109 tahun, SDN Godean 1 berusaha maksimal untuk menggali lebih dalam potensi yang dimiliki siswa melalui sejumlah kegiatan.



Pentas Pantomim siswa SDN Godean 1 dalam acara puncak peringatan HUT ke 109.

"Puncak peringatan yang harusnya di bulan September kami gelar di Oktober karena bulan kemarin, SDN Godean 1 fokus persiapan pada Lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Sleman," tegasnya, kemarin. Puncak peringatan ber-

langsung meriah dengan demonstrasi pencak silat dari siswa dan alumni, serta pentas pantomim yang berjudul "Berburu Burung di Hutan" yang dibawakan

siswa SDN Godean 1. Rahmad Susilo menambahkan dalam persiapan Lomba Sekolah Adiwiyata, sekolah menggandeng wali murid melalui paguyub-

an untuk turut aktif. Peran mereka pun cukup besar untuk mewujudkan lingkungan sekolah dan kelas yang nyaman, bersih dan sehat. **(Yud)-f**

Anggaran Pembangunan MPP Ditambah Rp 15 M

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman berencana membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pelaksanaan pembangunan MPP dilakukan melalui kontrak tahun jamak dan sudah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman di Aula Lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman, Jumat (22/10). Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut juga dilakukan pemaparan akhir Detail Engineering

Design (DED) MPP dari PT Arsi-graphi selaku Konsultan Perencana. Hadir pula Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta beserta tiga wakil ketua dewan. Menurut Bupati Kustini SP, ada penambahan anggaran dalam pembangunan MPP. Hal ini seiring dengan berjalannya kebutuhan di masa mendatang dan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat maupun karyawan diperlukan adanya penambahan ruangan. "Konsekuensinya adalah diperlukan penambahan dana untuk pembangun-

an MPP yang semula dianggarkan sebesar Rp 55 miliar menjadi sebesar Rp 70 miliar. Jadi ada penambahan Rp 15 miliar," ungkapnya. Kustini memaparkan, MPP terdiri dari bangunan basement, lantai dasar sampai dengan lantai 4. Adapun lokasi pembangunan berada di sebelah barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP3) saat ini. MPP ini didesain untuk menyediakan ruang pelayanan berbagai perijinan, baik internal Pemkab Sleman maupun instansi vertikal. **(Has)-f**



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

PENGAWASAN PERDA OLEH KOMISI D DPRD SLEMAN

Pendidikan Nonformal Bebas Retribusi



Benedicte Rury Tyas Pramuri SE.

SLEMAN (KR) - Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sekarang ini sudah tidak ada retribusi. Semua biaya pendidikan dan pelatihan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Pemda DIY. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Tri Mulia

Wijayanti SSt mengatakan, semua pendidikan sekarang ini sudah gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Hal itu untuk menjamin semua anak usia sekolah bisa mengakses dunia pendidikan. "Pendidikan sekarang ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya agar semua anak bisa mengenyam dunia pendidikan," kata Tri Mulia, Minggu (24/10). Politisi perempuan dari Fraksi Gerindra ini menuturkan, pemerintah tidak hanya menanggung biaya pendidikan formal saja. Namun juga menanggung biaya pendidikan nonformal bagi masyarakat yang ingin mengasah keterampilan. "Misalnya ingin kursus di Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai kejuruan otomotif, listrik, bangunan, pertanian dan peternakan, tata niaga maupun aneka kejuruan lainnya. Semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah melalui BKK

provinsi," ucap perempuan yang kerap dipanggil Lia ini. Sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2013 tentang retribusi layanan pendidikan, masih mengatur adanya pungutan tentang pendidikan nonformal. Sehingga perda tersebut sudah tidak se-

suai dengan kondisi sekarang ini. "Memang perda ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Soalnya sekarang ini pendidikan nonformal sudah tidak ada retribusi lagi alias gratis. Saya rasa perda ini perlu dihapus," tuturnya.



Tri Mulia Wijayanti SSt menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi D lainnya Benedicte Rury Tyas Pramuri SE. Menurutnya, Perda ini sejak 2013 hingga sekarang tidak ada perubahan. Bahkan No 5 Tahun 2013 tentang retribusi layanan pendidikan ini tidak menyinggung tentang dinas pendidikan. Melainkan lebih fokus pada pendidikan nonformal. "Sejak perda ini diterbitkan hingga sekarang, belum ada perubahan. Kemudian tidak menyangkut dinas pendidikan tapi lebih fokus pendidikan nonformal," kata Rury. Untuk pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah sudah tidak ada pungutan. Mengingat sekarang ini sudah ada anggaran dari APBD provinsi melalui BKK. "Dengan adanya anggaran BKK dari provinsi itu untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam meningkatkan ketrampilan. Harapannya bisa mengurangi jumlah pen-



Tri Mulia Wijayanti SSt

gangguran dan membuka lapangan kerja," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, Rury menilai Perda No 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Layanan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini. Pihaknya menyarankan perda tersebut untuk dihapus. "Sebaiknya dihapus saja soalnya sudah tidak mungkin lagi digunakan," pungkash Rury. **(Sni)-f**